

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN WILAYAH PERDESAAN

Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

*(Characteristics of Poor Households in Rural Areas
Case Study in East Kalimantan Province in 2020)*

Lita Januarti Hakim¹, Jami'atul Mualifah², Sholihuddin³

Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau^{1,2,3}

E-mail: lita.hakim@bps.go.id

Submitted: 28 Oktober 2021 | Accepted: 29 Desember 2021

ABSTRAK

Pembangunan dan kemiskinan merupakan suatu kejadian yang senantiasa berjalan beriringan sebagai kebijakan dan upaya perbaikan yang dilakukan pada suatu daerah. Kemiskinan merupakan suatu fenomena dinamis, dimana setiap orang memiliki peluang untuk masuk dan keluar dari kategori miskin. Status miskin dari rumah tangga dapat berubah dari waktu ke waktu. Rumah tangga dengan status miskin pada waktu sekarang mungkin saja berubah menjadi tidak miskin pada waktu mendatang, begitu pula sebaliknya. Penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di wilayah perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Timur. Data yang digunakan adalah data mentah (*raw data*) yang merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis uji Khi Kuadrat (*Chi-Square test*). Variabel penelitian yang merupakan karakteristik rumah tangga yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur adalah data *cross section* dengan periode data 2020 status miskin rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, ijazah tertinggi kepala rumah tangga, lapangan usaha pekerjaan utama kepala rumah tangga dan status kelayakan tempat tinggal rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga miskin wilayah perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakteristik antara lain 62,53 persen memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih dari empat, tingkat pendidikan KRT nya sebanyak 71,18 persen adalah tamatan sekolah dasar ke bawah, sebanyak 63,62 persen rumah tangga memiliki KRT yang bekerja pada sektor pertanian serta sebanyak 71,61 persen rumah tangga bertempat tinggal di rumah yang tidak layak huni. Berdasarkan hasil uji Khi Kuadrat juga menunjukkan adanya hubungan antara karakteristik rumah tangga yang diteliti dengan status miskin rumah tangga.

Kata Kunci : Kemiskinan, perdesaan, rumah tangga

ABSTRACT

Development and poverty are events that always go hand in hand as policies and improvement efforts are carried out in an area. Poverty is a dynamic phenomenon, where everyone would be the opportunity to enter and leave the poor category. The poor status of households may change from time to time. Households with poor status at now may turn out to be non-poor in the future, and vice versa. This study uses secondary data sourced from BPS East Kalimantan Province. This study aims to determine the characteristics of poor households in rural areas in East Kalimantan Province. The data used is secondary data sourced from BPS-Statistics of East Kalimantan Province. The analytical methods used in this study are descriptive analysis and Chi-Square test analysis. The research variables which are the characteristics of households in East Kalimantan Province are cross section data with a data period of 2020 poor household status, number of household members, gender of the head of the household, the highest diploma of the head of the household, the main occupation of the household head and the worthy status of household residence. The results showed that poor households in rural areas in East Kalimantan Province had characteristics such as 62.53 percent having more than four household members, the KRT education level of 71.18 percent being elementary school graduates and below, 63.62 percent of households have household heads who work in the agricultural sector and as many as 71.61 percent of households live in uninhabitable houses. Based on the results of the Chi Square test, it also shows that there is a relationship between the characteristics of poor households and the status of poor households.

Keywords: poverty, rural areas, households

PENDAHULUAN

Pembangunan dan kemiskinan merupakan suatu fenomena yang senantiasa berjalan beriringan sebagai kebijakan dan upaya perbaikan yang dilakukan pada suatu daerah. Pembangunan daerah dilakukan untuk memperoleh keseimbangan pada seluruh anggota masyarakat yang hidup pada daerah tersebut, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, taraf hidup maupun pekerjaan yang layak sehingga dapat terlepas dari jerat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama bagi hampir semua negara, terutama bagi negara-negara berkembang (Todaro and Smith 2003). Hampir setiap tahun pemerintah melakukan berbagai program dan kebijakan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Meskipun demikian, kemiskinan masih saja menjadi masalah yang belum tertuntaskan. Kemiskinan bukan saja berkaitan dengan permasalahan kesejahteraan tetapi juga kemiskinan itu terjadi karena berbagai alasan. Penyebab kemiskinan beraneka ragam, baik karena perubahan ekonomi yang terjadi secara tiba-tiba ataupun kemiskinan struktural yang terjadi secara turun temurun (orang tua yang miskin akan melahirkan anak yang miskin juga). Salah satu penyebab sulit turunnya angka kemiskinan secara signifikan yaitu karena masalah struktural (Maksum 2008). Ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan penduduk miskin mendapatkan peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses menuju pusat perekonomian, membuat penduduk miskin terperangkap dalam hidup yang serba kekurangan dan sulit meningkatkan pendapatannya.

Definisi kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya (BPS 2020b). Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non-makanan atau yang biasa disebut sebagai garis kemiskinan. Seseorang dikategorikan miskin secara absolut apabila tingkat pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan, dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sementara itu, kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal. Kemiskinan relatif merupakan suatu kondisi dimana individu atau kelompok individu berada dalam tingkat kekurangan dibandingkan standar kehidupan umum di lingkungan sekitarnya. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti akan selalu ada individu tertentu yang menjadi kelompok miskin dibandingkan individu lainnya.

Roda kehidupan selalu berputar sehingga status miskin dari rumah tangga dapat berubah dari waktu ke waktu. Rumah tangga dengan status miskin pada waktu sekarang mungkin saja berubah menjadi tidak miskin pada waktu mendatang, begitu pula sebaliknya. Kemiskinan merupakan suatu fenomena dinamis, dimana setiap orang memiliki peluang untuk masuk dan keluar dari kategori miskin (Chaudhuri 2003). Kondisi demikian dapat terjadi pada pelaku usaha sektor pertanian maupun jasa-jasa. Beberapa penelitian menemukan bahwa rumah tangga pelaku sektor jasa-jasa memiliki pendapatan yang relatif tidak stabil. Dikemukakan juga bahwa tidak hanya rumah tangga dengan pendapatan rendah saja yang dapat rentan miskin, tetapi juga rumah tangga dengan pendapatan relatif tinggi namun tidak stabil.

Pengentasan kemiskinan telah menjadi pusat perhatian dalam diskusi dan pembahasan kebijakan pada level pemerintah daerah, nasional bahkan internasional. Dalam agenda pembangunan global, upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan tertuang sebagai tujuan pertama dalam pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun (Bappenas 2017). Diperlukan berbagai upaya dan intervensi dari pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan karena menyangkut permasalahan multidimensi. Pemerintah yang dimaksud adalah pada tataran nasional dan juga tataran daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang lebih spesifik. Artinya, tidak ada lagi keseragaman dalam kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun oleh suatu daerah tetapi perlu mempertimbangkan kondisi setiap dimensi penyebab kemiskinan daerah tersebut (Bappenas 2018).

Secara umum, persoalan kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada dasarnya merupakan fenomena perdesaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, dari 26,42 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia, sekitar 57,76 persen diantaranya (15,26 juta jiwa) adalah

penduduk yang hidup di daerah perdesaan. Secara nasional, persentase penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 9,78 persen dan jika dibandingkan menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk miskin adalah 7,38 persen untuk daerah perkotaan dan 12,82 persen untuk daerah perdesaan. Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut data BPS, dari total penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebanyak 230,26 ribu jiwa, sekitar 50,81 persen diantaranya adalah masyarakat yang hidup di daerah perdesaan. Kemudian jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur masih relatif rendah, lebih kecil dari angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat (7,17 persen) dan Provinsi Kalimantan Utara (6,80 persen). Persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 6,10 persen pada tahun 2020 atau meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 5,94 persen. Pada tahun 2020 tersebut, angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur masih berada di bawah angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,78 persen. Namun, jika dirinci menurut perkotaan dan perdesaan, tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi dibandingkan tingkat kemiskinan perdesaan di provinsi lainnya di Pulau Kalimantan yaitu dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,51 persen pada tahun 2020. Sedangkan besarnya persentase penduduk miskin di perkotaan pada tahun yang sama hanya sebesar 4,45 persen.

Perbedaan kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa kemiskinan juga tidak terlepas dari adanya pengaruh karakteristik rumah tangga dalam wilayah masing-masing. Penelitian yang dilakukan pada sampel sebanyak tiga desa di Kulon Progo memberikan gambaran bahwa rumah tangga yang berhasil keluar dari kemiskinan memiliki karakteristik umum antara lain 1) mayoritas kepala rumah tangga berusia produktif, 2) mayoritas kepala rumah tangga pernah berpendidikan SMP atau SMA, 3) memiliki pendapatan yang stabil dan umumnya memiliki diversifikasi pekerjaan serta 4) tingkat partisipasi sosial yang tinggi (Pitoyo and Alfana 2015). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin, sehingga strategi pengentasan kemiskinan menjadi lebih tepat sasaran. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, melalui penelitian ini tujuan umum yang ingin dicapai adalah mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di wilayah perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur.

METODE

Penelitian ini mengkaji mengenai karakteristik rumah tangga miskin perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur. Variabel penelitian yang merupakan karakteristik rumah tangga yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur adalah data *cross section* dengan periode data 2020 yaitu status miskin rumah tangga, jumlah Anggota Rumah Tangga (ART), jenis kelamin Kepala Rumah Tangga (KRT), ijazah tertinggi KRT, lapangan usaha pekerjaan utama KRT, status kelayakan tempat tinggal rumah tangga.

Penentuan status miskin atau tidak miskin dari suatu rumah tangga dalam penelitian ini mengacu pada pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Berdasarkan pendekatan tersebut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan (2100 kkal/kap/hari) maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kebutuhan dasar tersebut sering dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Dengan demikian, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi sedangkan paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Dalam pengklasifikasian akses rumah tangga terhadap hunian/rumah layak huni didasarkan 4 (empat) kriteria, yaitu 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita (*sufficient living space*), 2) memiliki akses terhadap air minum layak, 3) memiliki akses terhadap sanitasi layak dan 4) ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit/keramik/parket/vinil/karpet/ubin/tegel/

teraso/kayu/ papan/semén/bata merah (BPS 2020a). Adapun definisi air minum layak, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs dimana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan. Untuk sanitasi layak, suatu rumah dikatakan memiliki sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Timur. Data yang digunakan adalah data mentah (*raw data*) yang merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis uji Khi Kuadrat (*Chi-Square test*). Uji Khi Kuadrat ini dilakukan untuk menguji apakah ada asosiasi (hubungan) antara dua buah variabel kategorik (Walpole 1995). Dalam pengujian ini, maka perlu disusun terlebih dahulu tabel kontingensi antar kedua variabel sebagaimana terlihat pada tabel 1. Tabel kontingensi yang memiliki r baris dan c kolom disebut sebagai sebagai tabel r x c. Adapun statistik uji dalam pengujian hubungan ini adalah sebagai berikut:

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(o_i - e_i)^2}{e_i} \dots \dots \dots (1)$$

dimana:

o_i adalah frekuensi amatan

e_i adalah frekuensi harapan

Frekuensi harapan di rumuskan

$$e_i = \frac{(Total\ kolom) \times (Total\ baris)}{Total\ pengamatan} \dots \dots \dots (2)$$

Tabel 1. Tabulasi kontingensi r x c.

Vaiabel 1	Variabel 2			Total
	Kategori 1	Kategori 2	...	Kategori c
Kategori 1	O_{11}	O_{12}		O_{1c}
Kategori 2	O_{21}	O_{22}		O_{2c}
...				
Kategori r	O_{r1}	O_{r2}		O_{rc}
Total	K_1	K_2		K_q

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang kaya dengan hasil bumi terutama produk batu bara. Pada tahun 2020, PDRB Provinsi Kalimantan Timur mampu menyumbangkan sebesar 3,85 persen terhadap total perekonomian Indonesia. Namun, sudut pandang pembangunan di suatu daerah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkaitan dengan taraf hidup masyarakat terutama masalah kemiskinan. Adapun kemiskinan ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial penduduk. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dimana untuk tingkat provinsi oleh gubernur dan untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Sebagai salah satu bentuk upaya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial telah melakukan terobosan melalui strategi Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita). Melalui program Pandu Gempita, kegiatan di masing-masing sektor diharapkan dapat saling menunjang sehingga program pemerintah bidang kesejahteraan sosial dapat terlaksana

secara efektif dan efisien. Dalam rangka pelaksanaan program pemerintah tersebut, diperlukan suatu informasi mengenai profil kemiskinan sehingga pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat lebih memfokuskan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik yang ada pada penduduk miskin tersebut.

Karakteristik sosial demografi rumah tangga miskin dapat dilihat melalui struktur rumah tangga miskin seperti jumlah ART dan karakteristik kepala rumah tangga. Ukuran jumlah anggota rumah tangga miskin cenderung besar dengan banyak anak dan banyak anggota rumah tangga. Hubungan antara kemiskinan dan jumlah anggota rumah tangga didasarkan pada asumsi bahwa rumah tangga miskin cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian anak yang tinggi (World Bank 2007). Berdasarkan hasil uji Khi Kuadrat dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara jumlah anggota rumah tangga dengan status miskin rumah tangga di wilayah perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur. Secara umum, dari total rumah tangga miskin perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 62,53 persen diantaranya memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih dari 4 orang. Jumlah ART berpengaruh negatif terhadap pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga. Dengan asumsi bahwa pendapatan tetap, maka dengan bertambahnya jumlah ART semakin berat beban ekonomi yang harus ditanggung rumah tangga pun semakin meningkat (Azam and Imai 2009). Atau dapat dikatakan bahwa semakin banyak jumlah ART, maka kemungkinan menjadi rumah tangga miskin semakin besar.

Selanjutnya, meskipun hasil uji Khi Kuadrat menunjukkan adanya hubungan antara jenis kelamin KRT dengan status miskin rumah tangga, namun ternyata rumah tangga dengan KRT berjenis kelamin laki-laki masih lebih banyak baik pada rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin yakni masing-masing sebesar 86,01 persen dan 89,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di desa di Provinsi Kalimantan Timur masih memberlakukan bahwa kepala rumah tangga adalah tugas dari laki-laki atau sang suami sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Adapun keputusan yang diambil dengan menjadikan perempuan sebagai kepala rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi suami yang tidak memungkinkan untuk bekerja karena sakit, malas, perempuan tersebut memang berstatus janda dan berbagai faktor lainnya.

Tabel 2. Persentase rumah tangga menurut status miskin dan karakteristik rumah tangga di wilayah perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020.

Uraian Variabel	Kategori Variabel	Status Miskin		Hasil Uji Khi Kuadrat	
		Miskin	Tidak Miskin	Nilai Khi Kuadrat	<i>P-value</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah anggota rumah tangga	4 atau kurang	37,47	77,14	16.746,47	0,0000
	Lebih dari 4	62,53	22,86		
Jenis kelamin KRT	Laki-Laki	86,01	89,67	287,44	0,0000
	Perempuan	13,99	10,33		
	SD ke bawah	71,18	50,46		
Tingkat pendidikan KRT	SMP	6,02	15,22	4.470,40	0,0000
	SMA	15,62	26,36		
	Perguruan Tinggi	7,18	7,96		
	Tidak bekerja	14,77	8,54		
Lapangan pekerjaan KRT	Pertanian	63,62	45,60	5.038,96	0,0000
	Industri	9,23	23,80		
	Jasa	12,38	22,06		
Kelayakan tempat tinggal	Tidak layak huni	71,61	40,82	7.824,22	0,0000
	Layak huni	28,39	59,18		

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020 BPS Provinsi Kalimantan Timur, diolah

Kemiskinan dan pendidikan juga memiliki hubungan yang saling berkaitan. Hasil uji Khi Kuadrat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan KRT dan status kemiskinan rumah tangga. Pendidikan menjadi sesuatu yang penting dalam memperoleh pekerjaan. Orang yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih mudah dalam memperoleh pekerjaan yang layak

dengan tingkat upah/gaji yang diterima juga lebih tinggi. Dengan demikian, tingkat pengeluaran rumah tangga dari orang tersebut dapat menjadi lebih banyak dan peluang rumah tangga tersebut menjadi miskin juga semakin rendah. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro and Smith 2003). Pendidikan tidak hanya akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menimbulkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kesempatan kerja akan terbuka lebih lebar dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Di Provinsi Kalimantan Timur, tingkat pendidikan KRT di wilayah perdesaan masih relatif rendah. Sebesar 71,18 persen KRT dari rumah tangga miskin memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar atau yang lebih rendah. Tingkat pendidikan rendah yang merupakan ciri rumah tangga miskin akan menjadi masalah dalam hal mencari pekerjaan di daerah perkotaan yang menuntut adanya keahlian ataupun tingkat pendidikan yang tinggi. Meskipun demikian, tabel 2. menunjukkan bahwa tidak sedikit juga rumah tangga tidak miskin yang KRT-nya berpendidikan sekolah dasar atau yang lebih rendah yaitu sebesar 50,46 persen. Menurut data BPS Provinsi Kalimantan Timur, dari jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.038 desa/kelurahan pada tahun 2020, 992 diantaranya telah memiliki fasilitas sekolah dasar. Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur masing-masing telah terdapat lebih 90 persen dari total desa/kelurahan yang sudah memiliki fasilitas sekolah dasar. Hanya Kabupaten Mahakam Ulu yang pencapaiannya masih di bawah 90 persen dimana terdapat sebanyak 38 desa/kelurahan yang sudah memiliki fasilitas sekolah dasar dari total sebanyak 50 desa/kelurahan (BPS 2021). Sedangkan untuk tingkat sekolah menengah, sebagian besar penduduk di wilayah perdesaan harus menjangkaunya ke desa lain yang memiliki fasilitas pendidikan tersebut. Dengan kondisi geografis Provinsi Kalimantan Timur, maka untuk mencapai sekolah menengah yang biasanya berada pada ibukota kecamatan juga menjadi salah satu kendala ketika akan melanjutkan sekolah menengah.

Selain dari sisi ketersediaan fasilitas pendidikan, terdapat faktor penyebab dari rumah tangga itu sendiri sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari sisi ekonomi, rendahnya pendapatan para penduduk yang sebagian besar mata pencahariannya adalah pertanian dan rendahnya pendidikan yang dimiliki, mengakibatkan mereka kesulitan dalam mengelola keuangan mereka. Menurut tingkat kepentingan, kebutuhan dasar pokok lah yang harus dipenuhi sehingga pendidikan anak-anak dalam rumah tangga tersebut menjadi tidak diprioritaskan. Permasalahan ini kemudian terus terjadi secara turun temurun dan saling berkaitan sama lain atau biasa disebut lingkaran setan kemiskinan. Selain faktor ekonomi, faktor sosial budaya juga berkontribusi terhadap rendahnya pendidikan di wilayah perdesaan (Mulyadi 2016), antara lain: 1) Biaya pendidikan yang terlalu tinggi untuk kemampuan ekonomi penduduk perdesaan, 2) Masih adanya pandangan pada sebagian besar penduduk bahwa "anak sebaiknya membantu orang tua bekerja di sawah, di ladang atau melaut dari pada pergi ke sekolah" dan 3) Adanya kenyataan dari sebagian besar penduduk atau anak-anak yang telah mengenyam pendidikan relatif tinggi, masih banyak yang menganggur dan masih bergantung pada orang tua mereka.

Gambaran adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin dari sisi karakteristik ketenagakerjaan dapat dilihat lapangan usaha atau sektor sumber penghasilan utama rumah tangga. Berdasarkan tabel 2. dapat terlihat bahwa persentase rumah tangga dengan KRT yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 63,62 persen. Pola yang sama juga terjadi pada rumah tangga tidak miskin dimana 45,60 persen diantaranya adalah rumah tangga dengan KRT bekerja pada sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor andalan dalam mata pencaharian sebagian besar masyarakat di wilayah perdesaan. Pada uraian sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa baik pada rumah tangga miskin maupun tidak miskin, di wilayah perdesaan didominasi oleh KRT berpendidikan SD ke bawah. Dengan hanya bermodalkan tingkat pendidikan yang rendah, mereka hanya mampu masuk ke sektor *unskilled work*, yaitu sektor pertanian. Sedangkan mereka yang terserap di sektor non pertanian, pada umumnya bekerja pada sektor-sektor yang mempunyai produktivitas yang rendah, misalnya sektor jasa (terutama yang berkaitan dengan fisik) seperti: tukang becak, buruh bangunan, pedagang kecil dan buruh industri

kecil (Muntiyah and Sukamdi 1997). Masih tersedianya lahan untuk melakukan kegiatan pertanian juga menjadi kesempatan dan alternatif pilihan ketika tidak dapat memasuki sektor pekerjaan yang sesungguhnya diinginkan. Selain itu, kebutuhan akan modal keuangan dari kegiatan usaha yang dilakukan pada sektor pertanian juga relatif lebih rendah. Hal ini disesuaikan dengan kondisi rumah tangga miskin perdesaan yakni memiliki modal manusia dan modal keuangan yang relatif rendah yang ditunjukkan dari pendidikan KRT yang hanya setingkat sekolah dasar dan keterbatasan dalam mengakses bantuan kredit untuk usaha (Nasution 2016).

Selain variabel demografi, kondisi perumahan (tempat tinggal yang layak atau tidak layak) merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga. Kondisi perumahan rumah tangga dapat memberikan gambaran aset yang dimiliki rumah tangga. Namun, dalam kondisi pendapatan yang semakin meningkat, maka akan diiringi dengan keinginan untuk memiliki tempat tinggal yang aman, nyaman dan memenuhi kriteria sehat. Secara umum, karakteristik perumahan pada rumah tangga miskin perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur, masih belum berada pada kondisi layak. Berdasarkan tabel 2. dapat terlihat bahwa terdapat sebanyak 71,61 persen rumah tangga miskin perdesaan yang tinggal di rumah dalam kondisi tidak layak. Masyarakat miskin masih menghadapi masalah berkaitan dengan akses terhadap perumahan yang sehat dan layak yang masih terbatas, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan atas pemilikan perumahan. Kondisi perumahan merupakan ciri utama yang paling sering dipakai dalam mengenali penduduk miskin, dan gejala ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak atas permukiman yang layak (Bappenas 2005).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rumah tangga miskin wilayah perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakteristik antara lain: 1) sebagian besar memiliki jumlah ART lebih dari empat, 2) lebih dari 80 persen rumah tangga miskin memiliki KRT berjenis kelamin laki-laki, 3) pendidikan KRT pada rumah tangga miskin masih rendah, mayoritas adalah tamatan SD ke bawah dan 4) KRT pada rumah tangga miskin lebih banyak bekerja pada sektor pertanian serta 5) sebagian besar rumah tangga miskin bertempat tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azam, Md. Shafiul, and Katsushi S. Imai. 2009. *Vulnerability and Poverty in Bangladesh*. Manchester.
- Bappenas. 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. 2017. *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. 2018. *Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- BPS. 2020a. *Indikator Perumahan Dan Kesehatan Lingkungan 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2020b. *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2021. *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2021*. Samarinda: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.
- Chaudhuri, Shubham. 2003. *Assessing Vulnerability to Poverty: Concepts, Empirical Methods and Illustrative Examples*. New York: Columbia University.
- Maksum, Mochammad. 2008. "Sindroma Kemiskinan Struktural Tidak Pernah Beranjak." in *Lokakarya: Menindaklanjuti Pemaknaan Kerakyatan dan Kebangsaan dalam Menyelesaikan Persoalan Kemiskinan dan Politik Biaya Tinggi, 15 Januari 2008*. Yogyakarta.
- Mulyadi, Asep. 2016. "Partisipasi Penduduk Dalam Bidang Pendidikan Di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang (Kajian Perbandingan Antara Penduduk Asli Dan Pendetang)." *Jurnal Geografi Gea* 6(2). doi: 10.17509/gea.v6i2.1738.
- Muntiyah, and Sukamdi. 1997. "Strategi Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Miskin Di Pedesaan." *Populasi*

8(2):35–58.

- Nasution, Ahmadriswan. 2016. "Peranan Modal Sosial Dalam Pengurangan Kemiskinan Rumah Tangga Di Perdesaan Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 7(2):171–83.
- Pitoyo, Agus Joko, and Muhammad Arif Fahrudin Alfana. 2015. "Strategi Rumah Tangga Miskin Perdesaan Keluar Dari Kemiskinan: Kasus Tiga Desa Di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta." *Populasi* 23(2):55–70.
- Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (Edisi Kedelapan)*. Jakarta: Erlangga.
- Walpole, Ronald E. 1995. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- World Bank. 2007. *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: World Bank.